



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di Asia Tenggara Dengan luas wilayah 5.193.250 km. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya manusia dengan memegang rekor peringkat-4 dengan jumlah SDM sebanyak 258.316.051 jiwa. Untuk menunjang ledakan penduduk yang terus menerus bertambah, maka pemerintah Indonesia membuat suatu gerakan yaitu program KB, perkembangan KB dimulai pada akhir 1960-an. Pada februari 1967 kongres PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) pertama diadakan dengan tujuan agar program KB segera direalisasikan oleh pemerintah. Program KB benar-benar direalisasikan pada tahun 1970-an, namun partisipasi masyarakat masih sangat rendah dan pemerintah terkesan memaksa. Pada 1980-an pemaksaan dikurangi dan program safari KB dimulai pada tahun 1988 terjadi perkembangan kebijakan dari pemerintah, dimana masyarakat memulai membayar sendiri untuk alat kontrasepsinya dan bebas memilih asalkan sudah terdaftar di departemen kesehatan. Mulai awal 1990-an hingga sekarang program KB terus dikembangkan dan mulai mendapat respon positif dari masyarakat.

Ledakan penduduk yang begitu tinggi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Disatu sisi kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia, tetapi di satu sisi kondisi tersebut menyebabkan beban negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi semakin besar, selain menjadi beban negara juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja ini bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas, yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat.

Karena berhubungan dengan tinggi rendahnya beban negara untuk memberikan kehidupan yang layak kepada setiap warga negaranya, maka pemerintah memberikan serangkaian usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang lebih besar. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggalakkan program KB (Keluarga Berencana).

Pelaksanaan program KB Nasional diberi tanggung jawab kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau dulunya bernama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dibentuk Melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 8 tahun 1970 sebagai sebuah Lembaga Non Kementerian atau dulunya disebut Lembaga Non Departemen. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga resmi pelaksana teknis program yang pelaksana kegiatannya terstruktur secara hierarki dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, hingga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang berada di kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan Program tiga pilar utama yaitu pengendalian pertumbuhan penduduk, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Keluarga Berencana dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan dinyatakan sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Sasaran dari program KB adalah pasangan menikah yang termasuk dalam usia/masa subur atau dikenal dengan Pasangan Usia Subur (PUS).

Program KB kemudian diwujudkan dengan penggunaan alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur PUS. Salah satu usaha pemerintah mewujudkan program KB tersebut adalah dengan menerapkan program-program tersebut yang diletakkan pada bidang kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Selain itu, untuk lebih mempermudah pembagian kerja nya, pemerintah membentuk pula suatu turunan Balai pada tingkat Kecamatan yang menangani bidang KB tersebut, yaitu Balai Penyuluhan Keluarga Berencana. Dimana salah satu Balai Penyuluhan Keluarga Berencana tersebut terdapat pada Kabupaten Kampar Kecamatan XIII Koto Kampar.

Balai Penyuluhan Keluarga Berencana sangat berperan penting dalam melaksanakan Program KB di tingkat kecamatan, penyuluhan lapangan keluarga berencana (PLKB) berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajak, mengayomi dan memotivasi setiap keluarga untuk mengikuti program keluarga berencana yang sesuai dengan visi BKKBN ditetapkan menjadi penduduk yang tumbuh seimbang, dan misi BKKBN mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Keberhasilan pelaksanaan program KB Nasional selama ini tidak terlepas dari kinerja petugas lapangan keluarga berencana (PLKB). Keberhasilan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam melaksanakan tugasnya harus didukung oleh kemampuan mereka dalam penguasaan program KB terutama dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah. Untuk itu petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) harus meningkatkan kinerjanya guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dan kegagalan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam pelaksanaan Program KB sering diidentik dengan keberhasilan dan kegagalan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dalam menumbuhkan partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap program KB di wilayah kerjanya, petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dituntut harus bekerja secara sistematis, terencana dengan mekanisme kerja operasional yang harmonis dengan masyarakat, pimpinan wilayah dan mitra kerja terkait lainnya.

Dengan demikian karena penyuluhan keluarga berencana merupakan ujung tombak pada tingkat desa/kelurahan dalam penggarapan program KB maka fungsinya dan tugasnya adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fungsi perencanaan
2. Fungsi pengorganisasian
3. Fungsi pelaksanaan
4. Fungsi pembinaan
5. Fungsi pencatatan dan pelaporan
6. Fungsi evaluasi

Sedangkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Perencanaan. PKB/PLKB dalam bidang perencanaan bertugas meliputi penguasaan potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan ditingkat RT,RW ditingkat desa/kelurahan.
2. Pengorganisasian. Tugas PKB/PLKB dibidang pengorganisasian meliputi Memperluas pengetahuan dan wawasan program, Rekrutmen kader, Mengembangkan kemampuan dan memerankan kader/IMP dan mitra kerja lainnya dalam program kependudukan dan KB.
3. Pelaksana dan pengelola program. Tugas PKB/PLKB dibidang Pelaksana dan pengelola melakukan berbagai kegiatan meliputi penyiapan IMP/LSOM dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan program, Memfasilitasi peran IMP/LSOM dan mitra lainnya penyiapan dukungan untuk terselenggaranya program kependudukan dan keluarga berencana didesa/kelurahan serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

advokai, KIE/Konseling maupun pemberian pelayanan Program KB dan Program KS.

4. Pengembangan. Tugas PKB/PLKB dibidang pengembangan meliputi Melaksanakan pengembangan kemampuan teknis IMP/LSOM dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana didesa/kelurahan
5. Evaluasi dan pelaporan. Tugas PKB/PLKB dibidang Evaluasi dan pelaporan program dan kependudukan dan KB sesuai dengan sistem pelaporan yang telah ditentukan secara berkala.

Balai Penyuluhan Keluarga Berencana harus mensosialisasi kan program-program yang telah di buat oleh pemerintah sehingga lajunya pertumbuhan penduduk seimbang dengan perekonomian kita sekarang. Alat kontrasesi yang harus disosialisasikan dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

UIN SUSKA RIAU

Tabel 1.1
Jumlah Peserta Kb Aktif Menurut Metode Kontrasepsi
Yang Sedang Digunakan Tahun 2015

NO	DESA/KEL	METODE KONTRASEPSI MODEREN												METODE KONTRAS EPSI TRADISON AL
		PESERTA KB PER METODE KONTRASEPSI								TOTAL	PUS PESE RTA KB PRIA	PUS PESERT A KB wanita	PUS PESER TA MKJP	
		PUS	IU D	MOW	MOP	KDM	IMPLAN	SUNTIK	PIL					
1	Batu Bersurat	421	4	0	0	4	16	179	66	269	4	264	21	3
2	Gunung Bungsu	288	2	3	0	5	25	125	73	233	5	228	30	1
3	Koto Tuo	424	0	0	0	3	28	167	118	316	3	313	27	0
4	Balung	317	1	0	0	4	18	182	19	224	4	212	19	0
5	Muara Takus	407	0	1	0	0	4	130	110	245	0	245	5	0
6	Pulau Gadang	396	10	1	0	9	17	134	80	251	9	242	28	0
7	Tanjung Alai	413	12	2	0	0	38	170	16	238	0	238	52	6
8	Ranah Sungkai	222	1	0	0	4	14	70	61	150	4	146	14	0
9	Lubuk Agung	294	2	0	0	3	20	121	31	177	3	174	22	0
10	Koto Masjid	388	1	11	0	2	15	178	76	283	2	281	27	1
11	Pongkai Istiqomah	107	1	1	0	1	3	47	21	74	1	73	5	0
12	Binamang	194	0	1	1	1	11	99	33	146	2	144	13	0
13	Koto Tuo Barat	185	0	4	0	1	1	90	22	118	1	117	5	0
Total		4.056	34	24	1	37	210	1.692	726	2724	36	2677	268	11

Sumber: Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Balai Penyuluhan Keluarga Berencana tersebut menangani sebanyak 13 desa. Dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) secara keseluruhan sebanyak 4.056 PUS. Dari jumlah akseptor KB aktif yang terdiri dari: 34 Pengguna IUD, 24 pengguna Medis Operasional Wanita (MOW), 1 pengguna Medis Operasional Pria (MOP), 37 pengguna kondom, 210 pengguna Implan, 1692 pengguna Suntik, dan 726 Pengguna Pil KB. Sementara itu, sekitar 1332 Pasangan Usia Subur (PUS) masih belum berpartisipasi sebagai akseptor KB aktif. alat kontrasepsi jangka pendek masih menjadi pilihan utama bagi para wanita. Ini terlihat dari tingginya penggunaan alat kontrasepsi suntik dan pil KB untuk wanita serta kondom untuk pria. Bahkan, suntik menjadi alat kontrasepsi primadona bagi para wanita dengan jumlah penggunaanya lebih kurang setengah dari total jumlah akseptor wanita. Adapun kondom masih menjadi pilihan utama bagi pria dengan jumlah akseptor yang jauh lebih besar dari pada MOP. Yang mana tabel diatas juga menjelaskan masih kurangnya partisipasi pria dalam ber-KB. ini terbukti hanya 1 PUS yang memakai MOP diantara 13 Desa/ Kelurahan Di Kecamatan XIII Koto Kampar.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Data Pasangan Usia Subur (PUS) baik yang ikut/Tidak ikut KB
dan jumlah peserta KB Di Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2015

No	Desa/ Kelurahan	Pasangan Usia Subur (PUS)		Jumlah
		Peserta KB	Tidak Peserta KB	
1	Batu Bersurat	269	152	421
2	Binamang	146	48	194
3	Pongkai Istiqomah	74	33	107
4	Koto Tuo	316	108	424
5	Koto Tuo Barat	118	67	185
6	Muara Takus	245	162	407
7	Gunung Bungsu	233	55	288
8	Balung	224	93	317
9	Tanjung Alai	238	175	413
10	Lubuk Agung	177	117	294
11	Ranah Sungkai	150	72	222
12	Pulau Gadang	251	145	396
13	Koto Mesjid	283	105	388
Total		2724	1332	4056

Sumber: Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 2015

Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang tidak ikut KB kecamatan XIII koto kampar mencapai 1332 pasangan usia subur (PUS), ini menunjukkan jumlah cukup tinggi. Tabel diatas menjelaskan perlu di tingkatkan Perhatian terhadap pasangan usia subur (PUS) yang masih belum ikut KB memang harus menjadi perhatian penting. Kondisi ini memperlihatkan masih belum maksimalnya kinerja Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dalam mempengaruhi dan mengajak pasangan usia subur (PUS) untuk ikut program KB.

Dimana setiap tahunnya berdasarkan sensus penduduk pada Kecamatan XIII Koto Kampar jumlah penduduk kecamatan XIII Koto Kampar dapat dilihat pada tabel

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Kecamatan XIII Koto Kampar
Tahun 2013-2016

No	Tahun			
	2013	2014	2015	2016
1	22.998	23.599	24.144	25.245

Sumber : Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 2013-2016

Dari tabel diatas jelas bahwa dari tahun ketahun lajunya pertumbuhan penduduk yang signifikan bertambah. Pada tahun 2013 terdapat 22.998 jiwa, tahun 2014 terdapat 23.599 jiwa, selanjutnya tahun 2015 terdapat 24.144 jiwa dan pada tahun 2016 terdapat 25.245 jiwa, di sini menunjukkan semakin laju nya pertumbuhan penduduk di kecamatan XIII koto kampar. Untuk menangani sebanyak 25.245 jiwa, pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana ini hanya memiliki 2 tenaga pegawai Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Nama-Nama PLKB dan Desa Yang Ditangani Oleh PLKB

No	Nama	Desa/Kelurahan Binaan	Keterangan
1.	Waternis 19620102 198703 1 020 Penata TK 1/ III/d	1. Koto Mesjid 2. Tanjung alai 3. Batu bersurat 4. Koto tuo 5. Koto tuo barat 6. Muara takus	Koordinator PKB Kec XIII Koto Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Steffi Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.	<p style="text-align: center;">Hanuda</p> <p style="text-align: center;">19690101 199303 2 023</p> <p style="text-align: center;">Penata TK 1/ III/d</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lubug agung 2. Ranah sungkai 3. Balung 4. Binamang 5. Pulau gadang 6. Pongkai istiqomah 7. Gunung bungsu 	
----	--	---	--

Sumber : Balai Penyuluhan Keluarga Berencana 2016

Dari data diatas dengan jumlah pegawai yang hanya 2 orang yang mengelola sebanyak 13 desa dengan jarak desa yang berjauhan, maka tidak maksimal nya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi nya. Dari data diatas, jelas bahwa dengan jumlah desa sebanyak 13 desa tersebut, tidaklah mampu pegawai tersebut untuk menjalankan segala kebutuhan masyarakat berkaitan dengan program KB tersebut, selain itu kurang nya penyuluhan bagi masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui program-program yang telah tersedia. Sehingga kepuasan masyarakat akan kinerja dari 2 pegawai tersebut kurang dirasakan, karena tidak adanya kinerja yang tampak oleh masyarakat dan jasa yang bisa dirasakan secara jelas.

Dalam pelaksanaan program keluarga berencana tahun 2016 pada Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di kecamatan XIII koto kampar. penulis menemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tenaga penyuluhan keluarga berencana di kecamatan XIII koto kampar yang mana hanya ada 2 orang penyuluhan. Hal ini peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemukakan berdasarkan hasil wawancara tanggal 12 November 2016 kepada Koordinator Penyuluhan Keluarga Berencana yang bernama waternis Beliau mengatakan :

“kurangnya SDM penyuluhan lapangan keluarga berencana,yang mana seharusnya 1 PLKB/PKB idealnya membina 1-2 desa/kelurahan, akan tetapi kenyataannya penyuluhan keluarga berencana di kecamatan XIII koto kampar hanya memiliki 2 PKB yang terdiri dari 13 kelurahan/desa.”

2. Masih rendahnya minat masyarakat mengikuti Program KB, karena belum ada sosialisasi khusus yang dilakukan dalam memperkenalkan atau mempromosikan alat-alat Kontrasepsi.
3. Kurang penyuluhan yang dilakukan kepada pihak pria

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?
2. Apasaja Faktor-Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan XIII Koto Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan XIII Koto Kampar kabupaten kampar?
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Kualitas Pelayanan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Sebagai masukan serta informasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Program keluarga Berencana.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang?

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi dibagi atas enam pokok bahasan bab dan masing-masing dibagi dalam beberapa sub-sub seperti berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dimana didalamnya dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menyajikan teori yang melandasi penulisan, Peraturan yang melandasi Kepuasan Masyarakat, pandangan islam tentang konsep penelitian, Definisi Konsep, Konsep Operasional, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran umum Kecamatan XIII Koto Kampar, gambaran umum Lokasi penelitian yaitu sejarah singkat tentang Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan XIII Koto Kampar, keadaan geografis struktur atau jabatan BPKB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian berdasarkan fakta dan data dengan menggunakan metode yang telah ditemukan, mengungkapkan dan menjelaskan hasil-hasil temuan sesuai dengan tujuan penelitian, membahas hasil penelitian secara mendalam dan didasari oleh argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.